

Profil Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Sejarah

Sebelum dibentuknya Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana diamanatkan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan bidang perhubungan oleh pemerintah pada tingkat Provinsi dilaksanakan secara bersama – sama oleh unit kerja pemerintah pusat yakni KANWIL Departemen Perhubungan dan Dinas LLAJ sebagai Unit Kerja PEMDA yang khusus menangani tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan ditetapkannya PERDA nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dimaksud maka keseluruhan tugas dibidang perhubungan sebagaimana ditetapkan PP 25 Tahun 2000 sepenuhnya dilaksanakan melalui Dinas Perhubungan Provinsi dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang ada 165 orang yang merupakan penggabungan dari personil eks Kanwil Departemen Perhubungan dan eks Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu pula Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara struktural membawahi 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan masing – masing :

- a. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua dan Kab. Alor di Kupang
- b. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka di Atambua.
- c. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende dan Kab. Nagekeo di Maumere.
- d. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat di Ruteng.
- e. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya di Waingapu

Alamat

Dinas Perhubungan Provinsi NTT : Jl. Palapa No. 17 Oebobo – Kota Kupang

eMail : dishub.prov.ntt2@gmail.com

Visi dan Misi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD 2018-2023 adalah NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Visi tersebut mengandung makna, yakni:

- a. Bangkit, mencerminkan suatu tekad yang bulat untuk menggugah semangat seluruh masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki baik semangat restorasi maupun semangat bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan melalui peningkatan IPM dan dikaitkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
- b. Sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelauatan dan perikanan dengan indikator yang terukur.
- c. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi ini merupakan kerangka acuan bagi misi lainnya yaitu melakukan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip inklusif yang melibatkan semua stakeholder dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada 4 pilar pembangunan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek social, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

- b. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty).

Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor unggulan, karena itu misi ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT serta letak geografis yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional.

- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktifitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktifitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

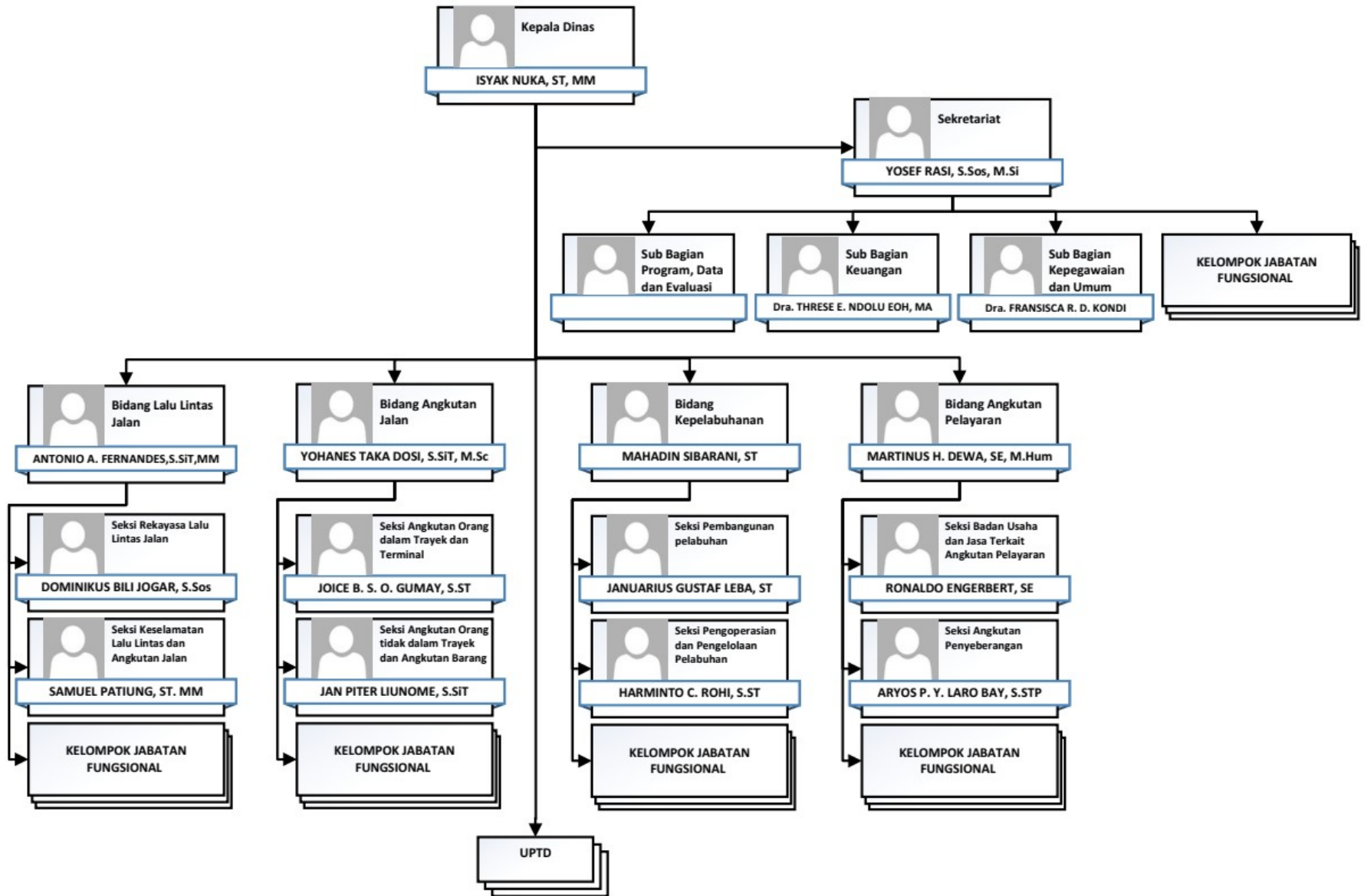
Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, trampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- e. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, perkeretaapian, laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, yaitu **Misi Ketiga : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

